

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- A. Mukhtie Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- A. Pangerang Moenta, 2017 a, *Permusyawaratan dan DPRD: Analisis Aspek Hukum dan Produk Permusyawaratan*, Intelegensia Media, Malang.
- _____, 2017 b, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- A. Suryaman Mustari Pide, 2009, *Quo Vadis Pendaftaran Tanah*, Pukap, Makassar.
- Abrar Saleng, 2013, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, ctk. Pertama, Membumi Publishing, Makassar.
- _____, 2007, *Kaidah Keseimbangan Dalam pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 24 Juli 2007.
- Aminuddin Ilmar, 2009, *Konstruksi dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, Hasanuddin University Press, Makassar.
- _____, 2006, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Cet-6, Kencana Prenada, Jakarta.
- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif Budiman, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2015, *Analisis Tematik ST2013 Subsektor Transformasi Struktural Usahatani dan Petani Indonesia*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- _____, 2015, *Penduduk Indonesia: Indonesia Population*, Badan Pusat Statistik, ISBN 978-979-064-912-5, Jakarta.
- _____, 2013, *Proyeksi Penduduk Indonesia: Indonesia Population Projection*, Badan Perencanaan Pembangunan nasional, badan Pusat Statistik, United Nation Population Fund, ISBN 978-979-064-606-3, Jakarta
- Bernard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Pustaka Matgaretha, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 2001, *Pemerintah daerah di Indonesia*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- E.Y. Kanler dan SR Sianturi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Ermaya Suryadinata, 1993, *Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan otonomi Daerah: Perkembangan Teori dan Penerapan*, Ramadhan, Bandung.
- F. Isjwara, 1978, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Bandung.
- F.W. Riggs, 1985, *Administration in Development Countries*, Boston.
- Farida patittingi, 2013, *Penerapan Prinsip-Prinsip Keadilan Sosial (Social Justice) Dalam Pengaturan Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Abbas Cheema dan Dennis A. Rondinelli, 1983, *Decentralization and Development*, Sage Publication, Inc .



- _____, 1990, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Polity Press, Cambridge.
- H.A.W. Wijaya, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, ctk. ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2010, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta.
- Imam Supardi, 2003, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung.
- J. Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, ctk. kedua, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press, Jakarta.
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung.
- Karwan A. Salikin, 2003, *Sistem Pertanian Berkelanjutan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Nursamedia, Bandung.
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas Media Group, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, 1994, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang
- Mustamin Dg Matutu, et.al. 1999, *Mandat Delegasi Atribusi dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Paul Spicker, 2000, *The Welfare State a General Theory*, SAGE Publications Ltd., London.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Group, Jakarta.
- Phillipus M.Hadjon, 1997/1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya
- _____, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Preston Sullivan, 2003, *Applying The Principles of Sustainable Farming, Fundamentals Of Sustainable Agriculture*, NCAT Agriculture, California.
- Rahardjo Adisasmita, 2013, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rochmat Soemitro, 1991, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Eresco, Bandung
- Romli Atmasasmita, 2012 a, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satijipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Materi Pokok Hukum dan Politik Agraria*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka, Jakarta
- _____, 1986, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.



- Tjhaya Supriatna, 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Totok Mardikanto, 2009, *Membangun Pertanian Modern*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Tumar Sumihardjo, 2008, *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*, Fokusmedia, Bandung.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.

B. Makalah

- Daud Silalahi, 2003, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) SDA yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi*, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Denpasar pada tanggal 14-18 Juli 2003.
- Frans B.M. Dabukke dan Muhammad Iqbal, 2014, *Kebijakan Pembangunan Pertanian Thailand, India, dan Jepang Serta Implikasinya Bagi Indonesia*, Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol 12, No 2, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian.
- Irawan B. 2005. *Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 23, Nomor 1, Juni 2005. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- K., Takabatake, 2013. *Agriculture Development Policy in Japan. Paper presented at the Workshop on Best Practices of Agricultural Development Policy in Selected Countries and Implication for Indonesia*, Yogyakarta, 18-19 June 2013. The Embassy of Japan in Indonesia. Jakarta.
- M. Nurcholis dan G. Supangkat, 2011, *Pengembangan "Integrated Farming System" Untuk Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Budidaya Pertanian, ISBN 978-602-19247-0-9, Bengkulu.
- Romli Atmasasmita, 2012 b, *Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, vol. 3 No. 1 Jurnal Hukum Priodis, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta.
- Shigetaka Taniyama, 1975, *Land Consolidation In Paddy Fields, Tropical agriculture research series: proceedings of a symposium on tropical agriculture researches*, Jircas, Tokyo.
- Vernon O. Roningen dan Praveen M. Dixit, 1991, *Reforming Agricultural Policies: The Case of Japan*, Journal of Asian Economics, Vol. 2, Tokyo

C. Karya Tulis Lainnya

- Benny Rahman, *Studi Mengenai Implikasi Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Pertanian*, <http://www.psedepta.go.id>.
- FAO. 1996. *Guidelines For Land-Use Planning*, FAO, Rome.
- Kazuhito Yamashita, 2008, *The Issues in the Farmland System*, <http://www.tokyofoundation.org>
- Robert A. Kluson, *Sustainable Agriculture: Definitions and Concepts*, The Journey to Sustainability Begins With Education, Fact Sheet Agriculture/Natural Resource Extension, <http://sarasota.extension.ufl.edu>



Tunggul Iman Panudju, *Mempertahankan Tanah Agraris*, <http://bulletin.penataanruang.net>.
<https://news.detik.com/berita/4241706/menteri-agraria-harap-tata-ruang-daerah-tiru-singapura>.
<http://pse.litbang.pertanian.go.id>
<http://www.starfarmagris.co.cc/2009/05/pertaniankerakyatanyangberkelanjutan.html>.
<http://www.ura.gov.sg/uol/Concept-Plan1971>
 KJRI Osaka, Profil Negara Jepang, www.Indonesia-osaka.org/wp-content/uploads/2016/11/Profil-Negara-Jepang.pdf.

D. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 Undang-Undang No. 12 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman
 Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan.
 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
 Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
 Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
 Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan
 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2012 tentang Insentif Lahan Pertanian Berkelanjutan.
 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Berkelanjutan.
 Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
 Peraturan Presiden No. 10 tahun 2006 tentang Badan pertanahan Nasional.



Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden No.20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden No. 54 Tahun 1980 tentang Kebijakan mengenai Pencetakan Sawah.

Keputusan Presiden No.53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.

Keputusan Presiden No.33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri.

Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden No.34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2004 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan.

Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

Instruksi Presiden RI No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan



LAMPIRAN

Data LP2B yang Melebihi dari Baku Lahan Sawah Hasil Audit Ditjen PSP Kementan, 2015

No	PROVINSI	NO. KAB/ KOTA	KABUPATEN/ KOTA	NO. PERDA	LUAS LP2B (HA)	LUAS BAKU LAHAN SAWAH (HASIL AUDIT) (HA)	LP2B LEBIH BESAR (HA)
1	Aceh	1	Aceh Barat	Perda No. 1 Tahun 2013	22,190.00	11,886.00	10,304.00
2	Bali	2	Jembrana	Perda No. 11 Tahun 2012	7,498.12	7,057.00	441.12
		3	Karang Asem	Perda No 17 Tahun 2012	29,543.00	7,115.00	22,428.00
		4	Gianyar	Perda No. 16 Tahun 2012	14,667.00	14,540	127.00
3	Banten	5	Pandeglang	Perda No. 3 Tahun 2011	53,951.00	47,153.00	6,798.00
4	Bangka Belitung	6	Belitung Timur	Perda No. 13 Tahun 2014	3,042.00	931.00	2,111.00
5	Jambi	7	Kerinci	Perda No. 24 Tahun 2012	33,022.00	16,064.00	16,958.00
		8	Batang Hari	Perda No. 16 Tahun 2013	18,103.00	8,256.00	9,847.00
		9	Sarolangun	Perda No. 2 Tahun 2014	48,145.00	4,918	43,227.00
		10	Merangin	Perda No. 4 Tahun 2014	43,213.71	11,034	32,179.71
		11	Tanjung Jabung Barat	Perda No. 12 Tahun 2013	54,879.00	19,197	35,682.00
		12	Tebo	Perda No. 6 Tahun 2013	36,162.00	4,394	31,768.00
6	Jawa Barat	13	Sukabumi	Perda No. 22 Tahun 2012	64,077.00	55,338.00	8,739.00
7	Jawa Tengah	14	Boyolali	Perda No. 9 Tahun 2010	45,000.00	36,776.97	8,223.03
		15	Kebumen	Perda NO. 23 Tahun 2012	44,986.00	42,119.00	2,867.00
		16	Banyumas	Perda No. 10 Tahun 2011	36,616.00	30,646.53	5,969.47
		17	Purworejo	Perda No. 27 Tahun 2011	30,092.00	29,794.24	297.76



		18	Pekalongan	Perda No. 2 Tahun 2011	24,195.00	23,131.49	1,063.51
		19	Banjarnegara	Perda No. 11 Tahun 2011	12,147.00	12,094.50	52.50
		20	Brebes	Perda No. 2 Tahun 2011	101,827.00	60,827.79	40,999.21
		21	Pemalang	Perda No. 3 Tahun 2011	37,615.00	32,109.53	5,505.47
		22	Magelang	Perda No. 5 Tahun 2011	42,070.00	36,800.45	5,269.55
		23	Tegal	Perda No. 10 Tahun 2012	41,296.00	39,814.74	1,481.26
		24	Pati	Perda No. 5 Tahun 2011	85,750.00	69,026.31	16,723.69
		25	Purbalingga	Perda No. 5 Tahun 2011	22,616.00	18,274.00	4,342.00
		26	Kudus	Perda No. 16 Tahun 2012	25,865.00	22,197.26	3,667.74
		27	Batang	Perda No. 7 Tahun 2011	27,514.00	19,384.00	8,130.00
		28	Kota Tegal	Perda No. 4 Tahun 2012	1,060.00	753.00	307.00
		29	Kota Pekalongan	Perda No. 30 Tahun 2011	1,045.00	788.00	257.00
8	Jawa Timur	30	Bayuwangi	Perda No. 8 Tahun 2012	61,841.00	50,336.64	11,504.37
		31	Bondowoso	Perda No. 12 Tahun 2011	47,293.10	42,485.24	4,807.86
		32	Kediri	Perda No. 14 Tahun 2011	42,291.00	38,928.83	3,362.17
		33	Trenggalek	Perda No. 15 Tahun 2012	13,056.00	9,629.54	3,426.46
		34	Tulungagung	Perda No. 11 Tahun 2012	26,000.00	24,612.86	1,387.14
		35	Sumenep	Perda No. 12 Tahun 2013	20,860.20	20,650.00	210.20
		36	Blitar	Perda No. 5 Tahun 2009	28,403.32	25,274.00	3,129.32
		37	Lumajang	Perda No. 2 Tahun 2013	32,323.00	31,929	394.00
9	Kalimantan Selatan	38	Kotabaru	Perda No. 11 Tahun 2012	19,513.00	9,860.00	9,653.00
		39	Barito Kuala	Perda No. 6 Tahun 2012	120,000.00	99,147.00	20,853.00
	Kalimantan Tengah	40	Sukamara	Perda No. 16 Tahun 2012	2,384.00	1,932.00	452.00
	Kalimantan Utara	41	Tana Tidung	Perda No. 16 Tahun 2012	6,400.00	955.00	5,445.00



		42	Nunukan	Perda No. 19 Tahun 2013	125,982.00	6,789	119,193.00
		43	Bulungan	Perda No. 4 Tahun 2013	16,504.00	11,856	4,648.00
12	Kalimantan Timur	44	Kutai Kertanegara	Perda No. 9 Tahun 2013	48,110.00	24,068.00	24,042.00
		45	Penajem Paser Utara	12,534.00	11,721	813.00	
13	Lampung	46	Lampung Selatan	Perda No. 15 Tahun 2012	121,825.00	39,288.00	82,537.00
		47	Lampung Tengah	Perda No. 1 Tahun 2012	142,755.00	74,284.00	68,471.00
		48	Tanggamus	Perda No. 16 Tahun 2010	20,000.00	17,956.00	2,044.00
		49	Tulang Bawang Barat	Perda No. 2 Tahun 2012	17,323.00	10,907.00	6,416.00
14	Maluku	50	Maluku Barat Daya	Perda No. 1 Tahun 2013	51,565.00	4.00	51,561.00
15	Maluku Utara	51	Halmahera Tengah	Perda No. 1 Tahun 2012	3,609.25	934.00	2,675.25
		52	Halmehera Utara	Perda No. 12 Tahun 2012	4,034.00	1,238.00	2,796.00
		53	Pulau Morotai	Perda No. 3 Tahun 2012	24,000.00	358.00	23,642.00
		54	Halmahera Barat	Perda No. 6 Tahun 2012	16,109.00	572.00	15,537.00
		55	Halmahera Selatan	Perda No. 7 Tahun 2012	21,789.00	720.00	21,069.00
16	Nusa Tenggara Timur	56	Sumba Tengah	Perda No. 8 Tahun 2011	5,100.00	4,099.00	1,001.00
		57	Sabu Raijua	Perda No. 3 Tahun 2011	15,574.00	589.00	14,985.00
		58	Nagekeo	Perda No. 1 Tahun 2011	9,936.00	7,707.00	2,229.00
		59	Alor	Perda No 2 Tahun 2013	9,435.00	482.00	8,953.00
17	Papua	60	Waropen	Perda No.1 Tahun 2012	117,849.00	103.00	117,746.00
		61	Yahukimo	Perda No. 2 Tahun 2011	125.00	-	125.00
18	Papua Barat	62	Fak-fak	Perda No. 7 Tahun 2012	450.00	-	450.00
		63	Raja Ampat	Perda No. 3 Tahun 2012	42,693.00	68.00	42,625.00
		64	Teluk Bintuni	Perda No. 4 Tahun 2012	496,608.00	818.00	495,790.00
		65	Teluk Wondama	Perda No. 11 Tahun 2012	49,010.00	-	49,010.00
		66	Manokwari	Perda No. 19 Tahun 2013	4,500.00	2,105.00	2,395.00
		67	Maybrat	Perda No. 2 Tahun 2012	55,000.00	-	55,000.00
	Sulawesi Selatan	68	Sidenreng Rappang	Perda No. 5 Tahun 2012	63,671.00	43,934.00	19,737.00



		69	Takalar	Perda No. 6 Tahun 2012	35,044.00	16,262.00	18,782.00
		70	Kepulauan Selayar	Perda No. 5 Tahun 2012	3,522.00	3,022.00	500.00
		71	Bulukumba	Perda No. 21 Tahun 2012	68,628.00	22,617.00	46,011.00
		72	Pinrang	Perda No. 14 Tahun 2012	49,190.00	48,614.00	576.00
		73	Janeponto	Perda No. 1 Tahun 2012	27,234.00	17,931.00	9,303.00
		74	Bantaeng	Perda No. 2 Tahun 2012	15,480.00	7,674.00	7,806.00
		75	Bone	Perda No. 2 Tahun 2013	119,216.00	89,709.00	29,507.00
20	Sulawesi Tengah	76	Buol	Perda No. 4 Tahun 2012	9,196.00	5,443.00	3,753.00
		77	Donggala	Perda No. 1 Tahun 2012	14,216.00	10,601	3,615.00
		78	Tojo Una-Una	Perda No. 47 Tahun 2011	5,078.00	1,216.00	3,862.00
		79	Banggai	Perda No. 10 Tahun 2012	88,055.00	21,859.00	66,196.00
21	Sulawesi Utara	80	Bolaang Mongondow Utara	Perda No. 3 Tahun 2013	13,724.00	5,731.00	7,993.00
		81	Kepulauan Sangihe	Perda No 1 Tahun 2014	500.00	9.00	491.00
		82	Minahasa Selatan	Perda No. 3 Tahun 2014	11,144.00	5,391.00	5,753.00
22	Sumatera Selatan	83	Muara Enim	Perda No. 13 Tahun 2012	36,539.00	28,475	8,064.00
		84	Kota Lubuk Linggau	Perda No.1 Tahun 2012	2,128.00	1,959.00	169.00
23	Kepulauan Riau	85	Natuna	Perda No. 10 Tahun 2012	4,928.00	389.00	4,539.00
		86	Lingga	Perda No. 2 Tahun 2013	5,205.00	149.00	5,056.00
24	Sulawesi Barat	87	Majene	Perda No. 12 Tahun 2012	2,513.00	760.00	1,753.00
25	Sulawesi Tenggara	88	Konawe Utara	Perda No 20 Tahun 2012	5,500.00	1,414.00	4,086.00
		89	Konawe Selatan	Perda No 19 Tahun 2013	45,618.00	16,201.00	29,417.00
		90	Kolaka Utara	Perda No. 6 Tahun 2012	9,466.69	1,596.00	7,870.69
		91	Wakatobi	Perda No. 12 Tahun 2012	24,551.00	-	24,551.00
		92	Bombana	Perda No. 20 Tahun 2013	54,510.00	10,977.00	43,533.00
		93	Kolaka	Perda No. 16 Tahun 2012	50,318.00	17,921.00	32,397.00
		94	Buton	Perda No. 1 Tahun 2014	16,618.00	1,426.00	15,192.00



		95	Konawe	Perda No 9 tahun 2014	35,469.00	26,623.00	8,846.00
26	Sumatera Barat	96	Solok Selatan	Perda No. 8 Tahun 2012	9,570.00	9,490.00	80.00
		97	Dharmasraya	Perda No. 10 Tahun 2012	14,643.00	7,977	6,666.00
27	Sumatera Utara	98	Batubara	Perda No. 10 Tahun 2013	17,032.00	14,108	2,924.00
TOTAL					3,719,477.39	1,694,304.91	2,025,172.48

Sumber: Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen PSP Kementan, 2015.



**Data LP2B yang kurang dari Luas Baku Lahan Sawah Hasil Audit
Lahan Hasil Audit Ditjen PSP Kementan, 2015**

NO	PROVINSI	NO. KAB/KOTA	KABUPATEN/KOTA	NO. PERDA	LUAS LP2B (HA)	LUAS BAKU LAHAN SAWAH (HASIL AUDIT) (HA)	SELISIH SAWAH - LP2B (HA)
1	Aceh	1	Aceh Tamiang	Perda No. 14 Tahun 2013	4,508.00	17,878.00	13,370.00
		2	Aceh Besar	Perda No. 4 Tahun 2013	14,202.55	26,785.00	12,582.45
		3	Bener Meriah	Perda No. 4 Tahun 2013	3,197.50	3,911.00	713.50
		4	Aceh Timur	Perda No. 10 Tahun 2013	7,475.00	31,861.00	24,386.00
		5	Pidie Jaya	Perda No. 4 Tahun 2014	7,739.21	8,762.00	1,022.79
2	Bali	6	Tabanan	Perda No 11 Tahun 2012	18,831.00	21,432.00	2,601.00
		7	Klungkung	Perda No. 1 Tahun 2013	3,496.00	4,003	507.00
		8	Buleleng	Perda No. 9 Tahun 2013	9,250.00	10,930	1,680.00
		9	Bangli	Perda No. 11 Tahun 2013	2,461.50	2,754	292.50
		10	Kota Denpasar	Perda No.27 Tahun 2011	1,560.00	2,458.00	898.00
3	Banten	11	Serang	Perda No. 10 Tahun 2011	13,121.00	49,543.00	36,422.00
4	D.I Yogyakarta	12	Gunung Kidul	Perda No. 6 Tahun 2011	5,500.00	28,071.00	22,571.00
5	Jambi	13	Tanjung Jabung Timur	Perda No. 11 Tahun 2012	17,000.00	26,403.00	9,403.00
		14	Sumedang	Perda No. 2 Tahun 2012	17,317.00	30,358.00	13,041.00
		15	Garut	Perda No.29 Tahun 2011	44,028.00	45,842.56	1,814.56
		16	Ciamis	Perda No. 15 Tahun 2012	17,815.00	47,854.89	30,039.89
		17	Cirebon	Perda No. 17 Tahun 2011	40,000.00	54,271.95	14,271.95
		18	Kuningan	Perda No. 26 Tahun 2011	11,706.00	29,103.06	17,397.06
		19	Indramayu	Perda No. 1 Tahun 2012	92,370.00	118,767.22	26,397.22
		20	Purwakarta	Perda No. 11 Tahun 2012	4,972.00	19,848.01	14,876.01
		21	Bekasi	Perda No. 3 Tahun 2011	35,244.00	62,901.55	27,657.55
		22	Bandung Barat	Perda No. 2 Tahun 2012	1,026.00	16,481.02	15,455.02
		23	Majalengka	Perda No. 11 Tahun 2011	39,190.00	50,962.00	11,772.00
		24	Kota Sukabumi	Perda No. 11 Tahun 2012	321.00	1,618.45	1,297.45
	Jawa Tengah	25	Sragen	Perda No. 11 Tahun 2011	41,082.00	48,583.00	7,501.00
		26	Blora	Perda No. 18 Tahun 2011	58,414.00	71,174.85	12,760.85



		27	Semarang	Perda No. 6 Tahun 2011	22,896.00	23,911.00	1,015.00
		28	Kendal	Perda No. 20 Tahun 2011	22,666.00	26,177.29	3,511.29
		29	Cilacap	Perda No. 9 Tahun 2011	65,050.00	65,507.45	457.45
		30	Grobogan	Perda No. 7 Tahun 2012	71,948.00	90,929.08	18,981.08
		31	Karanganyar	Perda No. 1 Tahun 2013	23,618.00	26,789.94	3,171.94
		32	Klaten	Perda No. 11 Tahun 2011	32,541.00	32,800.01	259.01
		33	Demak	Perda No. 11 Tahun 2011	56,610.00	60,207.04	3,597.04
		34	Rembang	Perda No. 14 Tahun 2011	39,143.00	40,305.00	1,162.00
		35	Sukoharjo	Perda No. 14 Tahun 2011	23,742.00	24,185	443.00
		36	Kota Semarang	Perda No. 14 Tahun 2011	3,056.00	3,281.00	225.00
		37	Kota Salatiga	Perda No. 4 Tahun 2011	274.00	631.00	357.00
		38	Kota Magelang	Perda No. 4 Tahun 2012	120.00	213.00	93.00
		39	Kota Surakarta	Perda No. 1 Tahun 2012	111.00	182.00	71.00
7	Jawa Timur	40	Bangkalan	Perda No. 10 Tahun 2009	12,161.76	43,062.98	30,901.22
		41	Bojonegoro	Perda No. 26 Tahun 2011	65,351.40	77,390.76	12,039.36
		42	Gresik	Perda No. 8 Tahun 2011	10,346.00	36,195.70	25,849.70
		43	Jombang	Perda No. 21 Tahun 2009	31,569.36	42,897.07	11,327.71
		44	Lamongan	Perda No. 15 Tahun 2011	45,841.00	84,734.66	38,893.66
		45	Malang	Perda No. 3 Tahun 2010	33,110.30	45,523.93	12,413.63
		46	Mojokerto	Perda No. 9 Tahun 2012	27,535.00	29,709.79	2,174.79
		47	Nganjuk	Perda No. 2 Tahun 2011	38,486.00	41,214.61	2,728.61
		48	Ngawi	Perda No. 10 Tahun 2011	41,523.00	46,029.58	4,506.58
		49	Pamekasan	Perda No. 16 Tahun 2012	12,306.00	26,003.37	13,697.37
		50	Ponorogo	Perda No. 1 Tahun 2012	25,000.00	33,816.43	8,816.43
		51	Probolinggo	Perda No. 3 Tahun 2011	38,692.00	48,784.57	10,092.57
		52	Sampang	Perda No. 7 Tahun 2012	33,445.00	45,779.81	12,334.81
		53	Tuban	Perda No. 9 Tahun 2012	23,000.00	52,814.69	29,814.69
		54	Situbondo	Perda No 9 Tahun 2013	30,032.00	37,171.00	7,139.00
		55	Magetan	Perda No. 15 Tahun 2012	19,084.00	21,627.00	2,543.00
		56	Kota Batu	Perda No. 7 Tahun 2011	1,252.00	2,888.82	1,636.82



		57	Kota Blitar	Perda No. 12 Tahun 2011	677.00	797.35	120.35
		58	Kota Kediri	Perda No. 1 Tahun 2012	500.00	1,733.06	1,233.06
		59	Kota Madiun	Perda No. 6 Tahun 2011	444.00	816.08	372.08
		60	Kota Pasuruan	Perda No. 1 Tahun 2012	605.00	1,336.00	731.00
		61	Kota Mojokerto	Perda No. 4 Tahun 2012	104.25	376.00	271.75
8	Kalimantan Selatan	62	Banjar	Perda No. 3 Tahun 2013	41,828.00	58,548.00	16,720.00
		63	Hulu Sungai Utara	Perda No. 12 Tahun 2012	23,359.00	27,056	3,697.00
9	Kalimantan Utara	64	Malinau	Perda No. 11 Tahun 2012	3,916.00	4,062	146.00
10	Lampung	65	Lampung Timur	Perda No. 4 Tahun 2012	50,553.00	56,510.00	5,957.00
		66	Way Kanan	Perda No. 11 Tahun 2011	8,479.00	17,166.00	8,687.00
		67	Pesawaran	Perda No. 4 Tahun 2012	8,452.00	13,447.00	4,995.00
		68	Mesuji	Perda No. 6 tahun 2012	13,169.00	22,558.00	9,389.00
		69	Pringsewu	Perda No. 2 Tahun 2012	6,494.00	13,255.00	6,761.00
11	Maluku Utara	70	Halmahera Timur	Perda No. 11 Tahun 2012	2,128.00	4,936.00	2,808.00
12	Nusa Tenggara Barat	71	Dompu	Perda No 48 Tahun 2011	15,985.00	17,987.00	2,002.00
		72	Sumbawa Barat	Perda No. 2 Tahun 2012	7,750.00	9,141.00	1,391.00
13	Nusa Tenggara Timur	73	Manggarai Timur	Perda No. 6 Tahun 2012	4,500.00	12,286.00	7,786.00
		74	Manggarai Barat	Perda No. 9 Tahun 2012	16,000.00	16,787.00	787.00
14	Sulawesi Selatan	75	Barru	Perda No. 4 Tahun 2012	11,448.00	13,498.00	2,050.00
		76	Sinjai	Perda No. 11 Tahun 2012	13,593.00	14,380.00	787.00
		77	Luwu	Perda No. 6 Tahun 2011	25,516.00	37,143.00	11,627.00
		78	Luwu Utara	Perda No. 2 Tahun 2011	20,314.00	20,578.00	264.00
		79	Toraja Utara	Perda No. 3 Tahun 2012	10,960.00	15,233.00	4,273.00
		80	Gowa	Perda No. 25 Tahun 2012	22,192.00	36,173.00	13,981.00
		81	Enrekang	Perda No. 14 Tahun 2011	4,969.71	9,460.00	4,490.29
		82	Maros	Perda No. 4 Tahun 2012	20,222.00	24,715.00	4,493.00
		83	Pangkajene Kepulauan	Perda No. 8 Tahun 2012	14,934.00	16,375.00	1,441.00
		84	Kota Pare-pare	Perda No. 10 Tahun 2011	476.00	834.00	358.00
	Sulawesi Tengah	85	MorowLL9ali	Perda No. 2 Tahun 2012	5,278.00	10,948.00	5,670.00
		86	Toli-Toli	Perda No. 16 Tahun 2012	5,502.00	12,570.00	7,068.00



16	Sulawesi Utara	87	Minahasa	Perda No 1 Tahun 2014	2,500.00	7,577.00	5,077.00
17	Sumatera Selatan	88	Ogan Komering Ilir	Perda No. 9 Tahun 2013	11,500.00	125,296.00	113,796.00
18	Sulawesi Barat	89	Polewali Mandar	Perda No. 12 Tahun 2012	15,870.00	16,611.00	741.00
		90	Mamuju Utara	Perda No. 1 Tahun 2014	3,030.00	3,226.00	196.00
19	Sumatera Barat	91	Lima Puluh Kota	Perda No. 7 Tahun 2012	3,200.00	23,771	20,571.00
		92	Tanah Datar	Perda No. 2 Tahun 2012	17,809.66	22,260	4,450.34
		93	Kota Padang	Perda No. 5 Tahun 2012	4,934.00	6,587	1,653.00
		94	Kota Pariaman	Perda No. 21 Tahun 2012	1,505.00	2,523	1,018.00
TOTAL					1,783,033.20	2,641,876.61	858,843.41

Sumber: Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen PSP Kementan, 2015



DAFTAR RIWAYAT HIDUP CURICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI:

1. Nama : Erfian Nur Dirman
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 27 Juni 1982
3. Suku/Bangsa : Massenrengpulu/Indonesia
4. Pekerjaan : PNS Dinas PUPR Kab. Pinrang
5. Keluarga :
 - Ayah : Drs. H. A. Muh. Nur Dirman, B.E.
 - Ibu : Hj. Johra A. Waris
 - Istri : dr. Hj. Nur Hikmah Rahman
 - Anak : A. Riopasuloi Ahmad Dirman
6. Alamat Rumah : 1. Perumahan Dokter Puskesmas Cempa
JL. Poros Akkajang No. 180 Kel. Cempa Kec. Cempa Kab.
Pinrang
2. JL. Poros Batulappa Lingk. Padang Lolo Kel. Kassa Kec.
Batulappa Kab. Pinrang
7. Alamat Kantor : JL Lasinrang No 26 Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab.
Pinrang
8. e-mail : *erfiannurdirman@gmail.com*

B. RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. Tamat SD Negeri 1 Pinrang Tahun 1995
2. Tamat SMP Negeri 1 Pinrang Tahun 1998
3. Tamat SMA Negeri 5 Makassar Tahun 2001
4. Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2001-2006)
5. Magister Kenotariatan (S2) Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (2006-2010)
6. Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

C. RIWAYAT PEKERJAAN DAN PENGALAMAN KERJA:

1. Staf pada Kantor Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (2007-2010)
2. Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang (2010-Sekarang)
3. Dosen Luar Biasa pada STIM Lasharan Jaya Pinrang (2013-2015)
4. Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Barat (2015-2016)
5. Dosen Luar Biasa pada STIH Cokroaminoto Pinrang (2017-sekarang)

D. PELATIHAN:

1. Penyusunan SOP dan Standar Pelayanan Publik bagi SKPD Prov. SulSel (2013)



2. Pelatihan Teknis Pelaksanaan Operasional Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum (2013)
3. Workshop Pengembangan Widyaiswara Pusdiklat Regional Makassar (2015)
4. Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kontrak Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2016)
5. Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat dan Pengelolaan Kearsipan Prov. SulSel (2018)

E. KARYA ILMIAH:

1. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2006)
2. Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Penataan Bidang Pertanahan (2010)
3. *Food Agricultural Land Legal Protection to Improve Food Security in Indonesia* (2018)
4. *The Regional Government Authority on Food-Crop Agricultural Land Protection* (2018)

F. PENGALAMAN ORGANISASI:

1. Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 1 Pinrang (1995-1997)
2. Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pinrang (1998-1999)
3. Ketua MPK SMA Negeri 1 Pinrang (1999-2000)
4. Dewan Ambalan Pramuka Pelita Sehati SMA Negeri 1 Pinrang (1999-2000)
5. Anggota/Pengurus DEMA (Dewan Mahasiswa) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2002-2003)
6. Anggota/Pengurus BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2003-2005)
7. Anggota Relawan PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) (2002-2006)
8. Anggota/Pengurus UKPM (Unit Kegiatan Pers Mahasiswa) Universitas Hasanuddin (2003-2006)
9. Pimpinan Redaksi Jurnal Mahasiswa EKSEPSI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2004)
10. Redaktur Jurnal Mahasiswa CATATAN KAKI Universitas Hasanuddin (2002-2006)
11. Wakil Ketua KNPI Kec. Batulappa Kab. Pinrang (2007-2009)
12. Ketua Pemuda Pancasila Kec. Batulappa Kab. Pinrang (2007-2010)

